



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RITA ENDANG
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 127402

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 11.218.885.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/116 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.090.106.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/115 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 855.515.000
3. Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 715.904.000
4. Tanah Seluas 283 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 341.632.000
5. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 955.125.000
6. Tanah Seluas 782 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.701.632.000
7. Tanah Seluas 1177 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.558.971.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 637.000.000

1. MOBIL, HONDA HONDA JAZZ Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, HONDA ALL NEW CRV TURBO RW1A - 1.5 TURBO CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 457.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 489.232.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.150.127.770



F. HARTA LAINNYA	Rp.	70.000.000
Sub Total	Rp.	13.565.244.770
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	13.565.244.770

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.